

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Kasemen (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang)

Alya Rahmah^{1*}, Dina Dwi Apriani², Meylani Wulandari³, Reza Triyana⁴, Siti Aminatul Zahro⁵, Reza Damayanti⁶

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: rahmahalya48@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-06-2026
Disetujui 11-06-2026
Diterbitkan 13-06-2026

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of flood disaster management policies in Kasemen Subdistrict by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Serang City, particularly in response to the major flooding that occurred in early 2026. Geographically, Kasemen Subdistrict is a downstream area prone to annual flooding due to the confluence of the Cibanten River overflow and tidal flooding (rob). Based on preliminary research, several issues were identified in the field, such as insufficient pre-disaster mitigation outreach, low levels of community self-preparedness, and suboptimal distribution of quick-response aid during emergency response. To analyze these issues, this descriptive qualitative study was designed using William N. Dunn's six-criteria policy evaluation framework, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data collection was designed using direct observation, in-depth interviews with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and affected communities, and documentation. Through this approach, the research results are expected to map bureaucratic barriers, assess the alignment of Local Regulation No. 3 of 2021, and formulate comprehensive long-term strategic recommendations for disaster management in Serang City.

Keywords: Policy Evaluation, Flood Mitigation, Serang City BPBD, Kasemen Subdistrict, William N. Dunn

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kasemen yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, khususnya dalam merespons fenomena banjir besar pada awal tahun 2026. Secara geografis, Kecamatan Kasemen merupakan wilayah hilir rawan banjir tahunan akibat pertemuan luapan Sungai Cibanten dan fenomena pasang surut air laut (rob). Berdasarkan pra-penelitian, ditemukan sejumlah masalah di lapangan seperti minimnya sosialisasi mitigasi prabencana, rendahnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat, serta distribusi bantuan quick response yang belum optimal saat tanggap darurat. Untuk membedah masalah tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini dirancang menggunakan pisau analisis 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengumpulan data direncanakan melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta masyarakat terdampak dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memetakan faktor penghambat birokrasi, menguji sinkronisasi

perda Nomor 3 Tahun 2021, serta merumuskan rekomendasi solusi strategis jangka panjang yang komprehensif bagi tata kelola kebencanaan di Kota Serang.

Katakunci: Evaluasi Kebijakan, Penanggulangan Banjir, BPBD Kota Serang, Kecamatan Kasemen, William N. Dunn

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmah, A., Apriani, D. D., Wulandari, M. ., Triyana, R., Zahro, S. A. ., & Damayanti, R. . (2026). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Kasemen (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5593-5601. <https://doi.org/10.63822/h24xjr90>

PENDAHULUAN

Secara global, fenomena banjir telah bertransformasi dari sekadar siklus alamiah menjadi krisis kemanusiaan multidimensi. Krisis dipicu oleh anomali iklim yang menyebabkan presipitasi ekstrem dan tidak terprediksi. Peningkatan suhu global secara signifikan mempercepat laju penguapan (evapotranspirasi), yang memicu terbentuknya awan konvektif dengan intensitas curah hujan tinggi yang melampaui ambang batas kapasitas infiltrasi tanah dan *drainase* perkotaan. Sementara wilayah tropis mengalami curah hujan dengan intensitas yang jauh melampaui kapasitas *drainase* yang ada. Peningkatan suhu bumi mempercepat penguapan air laut, yang kemudian jatuh kembali ke daratan dalam bentuk hujan ekstrem, sering kali disertai dengan badai atau siklon yang merusak.

Tekanan populasi dunia memaksa terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran, dimana area resapan air alami seperti hutan dan rawa kini berubah menjadi kawasan industri, pemukiman padat, atau lahan pertanian monokultur. Kondisi diperparah oleh kegagalan sistem tata ruang di banyak kota besar dunia yang tidak mampu mengimbangi laju urbanisasi, sehingga ketika volume air meningkat, sungai-sungai meluap dan menggenangi wilayah produktif. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi triliunan rupiah, tetapi juga memicu masalah sosial yang mendalam, mulai dari hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, krisis kesehatan akibat sanitasi yang buruk, hingga munculnya gelombang pengungsi iklim di berbagai belahan dunia.

Bencana alam masih menjadi kekhawatiran di dunia, termasuk di Indonesia khususnya bencana banjir (Patarru & Saranga, 2022) menegaskan bahwa urgensi penanganan meningkat seiring tidak menentukannya iklim global hal ini menjadi masalah besar karena letak geografis Indonesia yang berada di jalur pertemuan lempeng dan iklim tropis menyebabkan kerentanan tinggi terhadap cuaca ekstrem. Akibatnya, bencana ini merusak tatanan sosial serta melumpuhkan stabilitas ekonomi masyarakat lokal secara sistemik.

(Permadania Rysta Aditya, 2022), dimana menyampaikan bahwa banjir merupakan bencana yang paling bahaya yang dapat menyebabkan terputusnya perekonomian, hilangnya nyawa dan kerusakan harta benda. Jumlah bencana yang terjadi di dunia sebanyak 428 per tahun. Angka tersebut meningkat pada tahun 1999\2003 menjadi 707 kejadian bencana per tahun. Namun, bila dilihat berdasarkan grafik terjadi bencana di dunia tahun 1991-2015 dengan jumlah yang bersifat fluktuatif artinya jumlah terjadinya bencana tidak pernah dapat di perkiraan secara pasti.

Peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Berdasarkan laporan awal tahun 2026 bencana banjir melanda kembali di bagian titik-titik wilayah yang ada di Indonesia ketika musim hujan tiba, banyak kota di Indonesia yang mengalami banjir. Menurut (BNPB, 2021) Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdapat sebanyak 7.574 kasus banjir di Indonesia dari 2011-2020. Banjir ini memiliki tingkat intensitas yang sering selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 1.298 kejadian banjir.

Pemerintah Republik Indonesia menempatkan penanggulangan bencana sebagai salah satu pilar utama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan warga negara. Dalam kacamata administrasi publik, bencana bukan lagi dianggap sebagai fenomena alam mumi (*act of god*), melainkan sebuah kegagalan sistematis dalam manajemen risiko dan perencanaan wilayah. Secara teoritis, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan banjir adalah instrumen negara untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan umum.

Paradigma manajemen bencana telah mengalami pergeseran fundamental dari model responsive-

reaktif menuju model proyentif-proaktif. Secara universal, teori manajemen bencana modern mengacu pada siklus penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Hal ini berarti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hanya bertugas melakukan evakuasi saat air merendam permukiman tetapi, juga wajib melakukan mitigasi dan pengurangan risiko secara berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan menjadi titik krusial dalam siklus kebijakan publik. Mengutip pemikiran Daniel Mazanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat juga berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting. Dalam manajemen banjir, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada struktur proses evaluasi yang mencakup kejelasan standar sasaran, sumber daya kebijakan, dan hubungan antar organisasi. Jika struktur birokrasi di tingkat daerah tidak sinkron, maka kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di lapangan.

Manajemen risiko banjir memerlukan pendekatan komprehensif melalui integrasi kebijakan struktural. Kebijakan struktural berkaitan dengan pembangunan fisik seperti bendungan, tanggul, dan normalisasi sungai. Sementara itu, kebijakan non-struktural menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan, pemetaan rawan bencana, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peran sebagai *leading sector* dalam mengoreksifikasi kedua pendekatan tersebut di wilayah administratifnya. Efektivitas peran ini ditentukan oleh sejauh mana aparat pemerintah mampu menterjemahkan norma-norma hukum kedalam tindakan teknis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir namun krusial dalam siklus kebijakan publik menurut pemikiran William N. Dunn. Dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Analysis*, Dunn menegaskan bahwa evaluasi bukan sekedar menilai hasil akhir, melainkan memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan harus dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Dalam konteks bencana banjir di Kecamatan Kasemen, teori Dunn menjadi relevan untuk membedah sejauh mana evaluasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

William N. Dunn mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan suatu program pemerintah. Kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecakupan, perataan (ekuitas), responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menyoroti aspek responsivitas dalam penanganan banjir di Kota Serang. Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggapi kebutuhan nyata masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Kasemen, bukan hanya sekedar menjalankan prosedur administratif diatas kertas.

Kriteria efektivitas dalam teori Dunn menekankan pada pencapaian hasil atau target yang telah ditentukan. Dalam kebijakan penanggulangan banjir, efektivitas diukur dari seberapa besar penurunan tingkat kerugian dan frekuensi bencana setelah kebijakan diimplementasikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang mengembang tanggung jawab teknis untuk memastikan target-target mitigasi tersebut tercapai. Namun, data menunjukkan bahwa bencana banjir masih menjadi rutinitas tahunan di Kasemen, yang secara teoritis, mengindikasikan adanya masalah pada dimensi efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Dimensi kecukupan menilai sejauh mana pencapaian suatu tujuan dapat memecahkan masalah yang ada. Dunn berpendapat bahwa suatu kebijakan mungkin efektif secara teknis. Namun, tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Masalah banjir di Kecamatan Kasemen

membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif melainkan juga bersifat solutif secara fundamental. Melalui kriteria kecukupan, penelitian ini akan mengevaluasi apakah sumber daya, anggaran, dan peralatan yang dikerahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memadai untuk mengatasi kompleksitas banjir di wilayah hilir tersebut.

Secara konseptual analisis kebijakan berfungsi sebagai alat transformasi informasi dari masa lalu menuju masa depan Willian N. Dunn menyebutkan bahwa evaluasi memberikan pengetahuan tentang kinerja kebijakan yang telah lalu untuk memperbaiki kebijakan dimasa mendatang. *Studi evaluative* ini berusaha membedah realitas evaluasi kebijakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Serang dengan menggunakan pisau analisis kriteria Dunn. Hal ini dilakukan agar kebijakan penanggulangan banjir di masa depan tidak lagi mengalami kegagalan yang sama, sehingga kesejahteraan publik dan keamanan warga Kecamatan Kasemen dapat terjamin secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi tonggak Sejarah dalam transformasi manajemen bencana di Indonesia. Regulasi ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai entitas yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan warga dari ancaman bencana. Secara subtransiif, pasal 1 angka 6 dalam UU ini mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. penekanan pada aspek “pengurangan risiko” inilah yang seharusnya menjadi nyawa dalam setiap program yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Benana Daerah (BPBD) Kota Serang di Kecamatan Kasemen.

Pemerintah kota serang mengatur tata kelola kebencanaa secara spesifik melalui Peraturan Daerah (Perda) kota serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Perda ini lahir sebagai respon atas meningkatnya kompleksitas ancaman bencana di ibu kota provinsi banten. Dalam regulasi ini, Kecamatan Kasemen diidentifikasi sebagai salah satu wilayah prioritas mitigasi mengingat statusnya sebagai daerah rawan banjir. Mandate hukum ini memberikan kekuasaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak hanya bekerja saat keadaan darurat saja, tetapi juga melakukan interverensi prabencana yang meliputi perencanaan tata ruang yang berbasis pada pemetaan risiko bencana.

Evaluasi kebijakan daerah memerlukan sinkronisasi antara struktur organisasi dengan ketersediaan sumber daya. Berdasarkan Perda terebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijaka penanggulangan bencana serta pengungsian secara cepat, tepat, dan efektif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang mengemban tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil di Kecamatan Kasemen harus mengacu pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang telah digariskan dalam peraturan daerah guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar unit kerja.

Efektivitas penegakan hukum ini sering kali menemukan hambatan pada tatanan implementasi teknis. Meskipun UU No. 34 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang sudah mengatur pembagian peran yang jelas. Realita di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mendaai seluruh aspek mitigasi. Kecamatan Kasemen masih menghadapi permasalahan klasik berupa pendangkalan sungai dan kurangnya sistem peringatan dini yang terintegrasi. Fenomena ini menunjukkan adaya ketidak selarasan (*mismatch*) anantara idealitas norma yang tentang dalam peraturan dengan realitas implementatif yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah daerah.

Menurut (Ahdi, 2015) Penyebab lemahnya perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

pemahaman para birokrat daerah (pemda) adalah bahwa institusi yang menangani kebencanaan dalam hal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya bekerja pada saat terjadi bencana sehingga perencanaan pada saat prabencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan tidak jadi sebuah prioritas. (Fitrianto, 2020) bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu yang bentuk proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana adanya suatu kebijakan publik dapat memiliki nilai guna, yaitu dapat dengan cara membandingkan antara hasil yang diwujudkan dengan tujuan maupun target kebijakan publik dimana yang telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya.

Dengan itu secara dengan adanya administratif, keberadaan regulasi seharusnya menjamin terciptanya pelayanan publik yang responsif. Evaluasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Kasemen meninjau sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mematuhi amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang dalam melindungi kelompok yang rentan. Aspek akuntabilitas pemerintah diuji ketika bencana banjir tahunan tetap menimbulkan dampak yang sama meskipun perangkat aturan sudah tersedia secara lengkap tetapi menimbulkan dampak yang sama meskipun perangkat aturan sudah tersedia secara lengkap. Dengan demikian, landasan hukum bukan hanya sekedar dokumen inti, melainkan tolak ukur utama dalam menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan bencana.

Kecamatan Kasemen memiliki kompleksitas permasalahan banjir yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Serang, secara geografis, wilayah ini merupakan titik pertemuan antara aliran sungai dari hulu sungai dan fenomena pasang surut air laut (rob). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan masa air yang sulit mengalir ke laut saat intensitas guna tinggi dan air laut sedang pasang. Karakteristik ini menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang untuk memiliki strategi implementasi kebijakan yang lebih spesifik dan tidak bersifat dalam menangani bencana di wilayah air.

Kriteria responsivitas menurut teori Willian N. Dunn menjadi instrument penting untuk menilai sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menanggapi keluhan dan kebutuhan warga Kasemen. Responsivitas diukur dari kesesuaian anatar kebijakan yang diambil dengan aspirasi masyarakat terdampak. Peneliti melihat adanya potensi keidakpuasan publik terkait distribusi bantuan logistik dan waktu tanggap darurat. Apabila masyarakat merasa bahwa bantuan datang terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak saat air merendam pemukiman warga, maka impelentasi kebijakan tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat responsivitas yang rendah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk menyelidiki evaluasi implementasi kebijakan secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (*real-life-context*). Penelitian ini dilaksanakan secara naturalistik tanpa memanipulasi variabel pada beberapa lokasi strategis di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, meliputi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, Kawasan Pantai Gope, (Kelurahan Banten), Kelurahan Sawah Luhur, Kelurahan Kisalah, serta wilayah bantaran aliran Sungai Cibanten. Data yang digunakan deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, aparatur Kecamatan, serta masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Kasemen, Banten, dan Margaluyu. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum seperti Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007, perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021, laporan kebencanaan resmi, dan jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang menggabungkan observasi lapangan terhadap kondisi fisik sungai dan drainase, wawancara mendalam menggunakan pertanyaan terbuka, serta pencatatan dokumentasi administratif maupun foto lapangan. Prosedur analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi utama, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin validitas dan keabsahan temuan dilapangan, peneliti melakukan pengujian ketat yang mencakup empat standar kredibilitas (*creadibility*), keteralihan (*trasferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi evaluasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kasemen oleh BPBD Kota Serang menunjukkan dinamika yang kompleks antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Hasil kriteria efektivitas, kebijakan yang dijalankan belum mencapai target pengurangan risiko secara maksimal, mengingat banjir masih menjadi rutinitas tahunan yang melumpuhkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa Kecamatan Kasemen merupakan wilayah hilir yang menerima akumulasi aliran dari Sungai Cibanten dan terdampak fenomena pasang surut air laut (*rob*), sehingga efektivitas penanganan fisik saja tidak cukup tanpa integrasi manajemen risiko yang lebih luas. Dari sisi efisiensi, terdapat catatan mengenai ketepatan waktu respons (*quick response*) dan mobilisasi peralatan evakuasi yang belum optimal saat masa tanggap darurat berlangsung di awal tahun 2026. Analisis pada dimensi kecukupan menunjukkan bahwa sumber daya, anggaran, dan kapasitas infrastruktur seperti drainase makro belum memadai untuk mengatasi kompleksitas banjir di wilayah tersebut. Meskipun BPBD memiliki mandat melalui Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan program mitigasi prabencana sering kali tidak menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tindakan responsif saat bencana terjadi. Dalam aspek pemerataan (*ekuitas*), distribusi bantuan logistik masih menghadapi kendala koordinasi antar-instansi yang menyebabkan bantuan terkadang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak secara merata, terutama di titik-titik rawan seperti Kelurahan Banten, Margaluyu, dan Kasemen.



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Bersama Warga

Berdasarkan hasil observasi yang sudah kami lakukan dalam penelitian ini yaitu di beberapa lokasi yang terdampak banjir di kecamatan kasemen seperti sawah luhur, pantai Gope, dan Margahayu. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dari aspek responsivitas, petugas telah menunjukkan kinerja yang baik melalui aksi sigap mengevakuasi korban banjir di Kecamatan Kasemen ke posko darurat. Namun, terdapat kesenjangan antara pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya beberapa wilayah terdampak yang kurang mendapat perhatian, kesenjangan pelayanan ini terjadi akibat keterbatasan internal BPBD, khususnya terkait kuantitas personel dan ketidakcukupan armada operasional seperti perahu karet serta kendaraan evakuasi. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang menyebabkan beberapa wilayah terdampak menjadi sulit dijangkau, sehingga warga di area tersebut tidak mendapatkan bantuan evakuasi secara langsung. Tingkat kepuasan publik cenderung menurun akibat keterlambatan bantuan dan kurangnya intensitas edukasi serta sosialisasi mitigasi yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Masyarakat merasa bahwa intervensi pemerintah masih bersifat reaktif (*reactive policy*) daripada proaktif. Terakhir, dalam hal ketepatan, kebijakan yang diambil perlu ditinjau kembali agar lebih selaras dengan karakteristik geografis Kasemen yang unik. Solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai dan perbaikan tata ruang harus menjadi fokus utama untuk memutus siklus bencana tahunan, bukan sekadar memberikan bantuan darurat yang bersifat sementara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang di Kecamatan Kasemen masih belum berjalan optimal dan cenderung bersifat reaktif. Ditinjau dari kriteria William N. Dunn, aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih menghadapi kendala besar, seperti belum maksimalnya penurunan risiko banjir tahunan, keterlambatan waktu respons saat tanggap darurat awal tahun 2026, keterbatasan anggaran fiskal daerah, serta kurang meratanya distribusi bantuan logistik akibat kelemahan koordinasi antar-instansi. Selain itu, dari sisi responsivitas, meskipun petugas di lapangan dinilai

sigap melakukan evakuasi ke posko darurat, kepuasan publik menurun karena adanya wilayah terdampak yang sulit dijangkau akibat keterbatasan jumlah personel serta armada operasional seperti perahu karet. Oleh karena itu, ketepatan kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan mengalihkan fokus dari sekadar bantuan darurat sementara menjadi solusi jangka panjang yang proaktif dan komprehensif, seperti normalisasi Sungai Cibanten, perbaikan drainase makro, penataan ulang tata ruang kawasan rawan banjir, serta peningkatan intensitas edukasi mitigasi prabencana kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, D. (2015). *PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO*. 5(1), 13–30.
- Aprilin Heti Haksama, Setya, M. (2018). *KESIAPSIAGAAN SEKOLAH TERHADAP POTENSI BENCANA BANJIR DI SDN GEBANGMALANG KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO*. 20(2), 133–145.
- Asrulla, Muhajirin, R. (2024). *Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian*. 15(1), 82–92.
- Azhari, D. R., Lestari, D. A., & Arifin, W. A. (2022). *Pemodelan Spasial Genangan Banjir Rob, Studi Kasus: Pesisir Utara Banten (Kecamatan Kasemen)*. 173–181.
- BNPB, P. (2021). *Satu Dekade Data Bencana Indonesia 2011-2020*. Jakarta Pusdatinkom BNPB.
- Fitrianto, M. R. (2020). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 6(2), 197–201.
- Hetharia Jeremy Salomo. (2023). *STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA AMBON*. 1–11.
- Lubis, R., & Murhayati, S. (2025). *Karakteristik Penelitian Kualitatif Tujuan dan Manfaat Penelitian Kualitatif*. 9, 13066–13073.
- Nurul, H. A. (2014). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR (STUDI KASUS DI KAWASAN PERUMAHAN PONDOK GEDE PERMAI, JATIASIH, KOTA BEKASI PERIODE 2013-2014)*. 5, 1–55.
- Patarru, F., & Saranga, J. L. (2022). *Benua Asia, benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudra adalah bencana banjir (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). sehingga sangat berisiko mengakibatkan kerugian materi hingga dapat (Ibrahim et al., 2020). Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia bencana banjir tertinggi (Djafar et al., 2010; Rosadi, 2018). Menurut data merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan. tertentu di kota Makassar, maka sejumlah ruas jalan utama akan tergenang*. 6(3), 2166–2175.
- Permadania Rysta Aditiya, S. T. (2022). *Hubungan Kesiapsiagaan Remaja Dengan Keterampilan Menghadapi Bencana Pendahuluan*. 2(2), 53–58.
- Prim, Pola, N. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya* (T. S. N. Ika (ed.)). TAHTA MEDIA GROUP.
- RACHMA, W. G. (2025). *HABITUASI MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA JOMBOK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG*.
- Ramdani, S. D., Siregar, H., Abizar, H., & Pratiwi, H. (2024). *Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal Dugdug Rempug*. 5(1), 80–85.
- Riant, N. D. (2023). *PUBLIC POLICY*. PT. Elek Media Komputindo.